

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengupas tentang kegagalan kelompok Pro-Kemerdekaan Skotlandia dalam referendum 2014 lalu. Skotlandia merupakan negara bagian yang ada di Britanian Raya, negara tersebut berada dibawah otoritas Negara Inggris. Sebagai negara konstituen yang wilayahnya mencakup sepertiga bagian utara Pulau Britania, berbatasan dengan Inggris di sebelah selatan, Laut Utara di bagian timur, Samudera Atlantik di sisi utara dan barat, serta Selat Utara di laut Irlandia sebelah barat daya. Selain daratan utama, Skotlandia juga terdiri dari 790 pulau lebih.

Edinburgh merupakan ibu kota negara dan kota terbesar kedua yang merupakan pusat keuangan terbesar di Eropa. Pada abad ke-18, kota ini pernah menjadi salahsatu kekuatan Skotlandia dalam bidang industri, perdagangan, dan intelektual Eropa. Selain itu, kota terbesar utama yakni Glasgow. Kota ini merupakan kota terbesar di Skotlandia, yang juga menjadi kota industri terbesar di Eropa. Perairan Skotlandia terdiri dari sejumlah besar sektor Atlantik Utara dan Laut Utara yang mengandung cadangan minyak terbesar di Uni Eropa. Potensi inilah yang membuat Aberdeen dijuluki sebagai kota minyak Eropa.¹

Besarnya potensi yang dimiliki Skotlandia, tidak menutup kemungkinan Skotlandia dapat berdiri sendiri tanpa ada bayang-bayang Inggris. Kemerdekaan yang mereka perjuangkan sejak lama. Keinginan sebagian dari rakyat Skotlandia yang Pro-Kemerdekaan ini beberapa kali mengalami kegagalan. Permasalahan yang timbul ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi

¹ "Our City". Aberdeen City Council. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-22. Diakses pada tanggal 27 oktober 2016 pukul 18.25 WIB. Aberdeen's buoyant modern economy – is fuelled by the oil industry, earning the city its epithet as 'Oil Capital of Europe'

judul skripsi, yakni “Kegagalan Kelompok Pro-Kemerdekaan dalam Referendum 2014 di Skotlandia”.

Berawal dari sejarah bergabungnya Skotlandia sebagai negara bagian Britania Raya, yakni ketika Perang Kemerdekaan Skotlandia. Dimana, bagian awal dari perang yang berlangsung antara Kerajaan Inggris dan Skotlandia. Perang ini dimulai setelah Inggris menyerbu Skotlandia pada tahun 1296 dan berakhir saat kemerdekaan Skotlandia direstorasi secara *de jure* dengan ditandatanganinya Traktat Edinburgh-Northampton pada tahun 1328. Kemerdekaan secara *de facto* diperoleh sejak tahun 1314 setelah Skotlandia memenangkan Pertempuran Bannockburn. Dalam perang ini, Inggris mencoba menguasai Skotlandia, sementara Skotlandia berusaha mengusir Inggris.

Pada era modern awal, kerajaan Skotlandia yakni James IV menandatangani perjanjian damai abadi dengan Henry VII dari Inggris. Raja Skotlandia ketika itu juga menikahi putri Henry sebagai penyatuan mahkota. Satu dekade kemudian, James dengan bantuan Prancis memutuskan untuk menginvasi Inggris. Persekutuan antara Skotlandia dan Perancis berakhir pada disahkannya Traktat Edinburgh pada 1560.²

Pada tahun 1603, James VI, Raja Skotlandia mewarisi tahta kerajaan Inggris dan kerajaan Irlandia serta memerintah dengan nama James I. Pada 1698, Skotlandia mengupayakan sebuah proyek ambisius di tanah genting panama. Hampir semua rakyat Skotlandia menginvestasikan uangnya dalam proyek itu tapi gagal. Hingga kegagalan kolonisasi ini berperan penting terhadap penyatuan Skotlandia dengan Inggris pada tanggal 22 juli 1706 yakni pada Traktat Penyatuan yang disepakati kedua parlemen. Kemudian kerajaan Britani Raya menjadi satu secara politik dengan kerajaan Irlandia membentuk Kerajaan Britania Raya dan Irlandia.

Meskipun tergabung dalam negara berdaulat, sistem hukum Skotlandia terpisah dari sistem hukum Inggris dan

² "The Scottish Reformation,". BBC Scotland.dibaca pada tanggal 27 oktober 2016 pukul 18.40 WIB

Wales, serta Irlandia Utara. Skotlandia memiliki yuridikasi hukum publik dan hukum privat yang berbeda dengan negara konstituensi Britania lainnya. Setelah adanya referendum devolusi 1997, dibentuk badan legislatif devolutif bernama parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Parlemen ini memiliki kewenangan dalam negeri Skotlandia yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya.

Pada bulan Mei 2011, Partai Nasional Skotlandia menang mutlak dalam parlemen, dan berencana untuk melaksanakan referendum kemerdekaan pada tanggal 18 September 2014. Referendum ini bukan hanya menentukan masa depan Skotlandia, tapi juga nasib Kerajaan Inggris Raya (United Kingdom of Great Britain) yang terbentuk sejak 307 tahun silam. Persaingan kedua kubu makin sengit yakni kubu Pro-kemerdekaan dan kubu kontra yang masih ingin Skotlandia bergabung dengan Inggris.

Alasan timbulnya keinginan sebagian warga Skotlandia memilih untuk berpisah dari Inggris yaitu: *Pertama*, adanya keinginan menyingkirkan Partai Konservatif. Bagi Skotlandia, referendum bukan sekadar tentang kemerdekaan, tapi memastikan kelompok Konservatif tidak pernah lagi memerintah Skotlandia. Pemilih Skotlandia secara tradisional cenderung ke kiri, dan Partai Buruh selalu paling populer.

Partai Konservatif Kanan-Tengah tidak memiliki banyak pendukung. Dari 59 kursi yang diperebutkan pada Pemilu 2010, misalnya, Partai Buruh meraih 41. Konservatif Kanan-Tengah meraih satu. Sisanya direbut Partai Demokrat dan Partai Nasional Skotlandia. Berbeda dengan Skotlandia, orang Inggris akan selalu memilih Partai Konservatif. Jadi, kendati Skotlandia selalu memilih Partai Buruh, mereka sering menemukan diri berada di bawah pemerintahan Partai Konservatif.

Jika merdeka, orang Skotlandia akan selalu berada di bawah pemerintahan yang mereka pilih. Sejak krisis keuangan 2008, Inggris mengadopsi serangkaian kebijakan penghentian yang kejam, termasuk pemotongan biaya sektor publik dan memangkan tunjangan kesejahteraan. Keluarga berpenghasilan

rendah di Skotlandia terkena dampak buruk kebijakan ini. Inilah yang mendorong orang Skotlandia ingin memastikan Konservatif tidak boleh lagi memerintah Skotlandia.

Kedua, otonomi sebagai simbol kebanggaan nasional. Catatan *The Economist* menyebutkan, referendum tidak akan mengubah kalkulasi pajak dan pendapatan minyak, tapi mengubah identitas dan kekuasaan. Gagasan Skotlandia dapat menentukan nasib sendiri lewat referendum menjadi sesuatu yang menggembirakan, dan membuat orang Skotlandia melupakan semua prediksi buruk setelah lepas dari Inggris.

Tahun 1999, Skotlandia menciptakan parlemen pertama. Britania Raya memberikan hak otonomi di bidang pendidikan dan kesehatan. Ternyata, pemberian otonomi itu memicu kelompok nasionalis menuntut hak otonomi lebih luas. Kini, orang Skotlandia dihadapkan pada pilihan merdeka atau tetap bersama Inggris. Jika referendum ini tidak dimanfaatkan untuk merdeka, orang Skotlandia mungkin tidak punya kesempatan lagi sampai beberapa generasi ke depan.

Ketiga, mereka yakin kemerdekaan akan meningkatkan perekonomian. Kubu pendukung kemerdekaan berpendapat Skotlandia yang merdeka akan lebih mampu mengelola perekonomian, terutama penghasilan dari pajak dan cadangan minyak di lepas pantai Skotlandia.

Keempat, partai Nasional Skotlandia (SNP) menguasai Parlemen Skotlandia. Alex Salmond sebagai Pemimpin partai sekaligus menjabat sebagai Kepala Menteri Skotlandia saat itu melaksanakan kampanye 'yes', yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan Skotlandia dari perserikatan Inggris. Keberhasilan Partai Nasional Skotlandia dalam meraih mayoritas suara lewat pemilihan umum 2011, dengan perolehan 69 dari total 129 kursi membuat keyakinan besar untuk melangkah lebih maju dalam menghantarkan kemerdekaan bagi Skotlandia kelak.³ Serta ditambah dari

³“Antara tahta kerajaan dan kemerdekaan Skotlandia”, BBC diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/05/120531_jubileescotlandviews.shtml di akses pada tanggal 18 november 2016 17:45 WIB

dukungan berbagai partai yang setuju dengan adanya referendum.

Referendum yang mempertimbangkan apakah Skotlandia harus menjadi negara merdeka atau tidak dicetuskan oleh SNP ini, diadakan pada tanggal, 18 September 2014. Hasil jejak pendapat yang dilaporkan oleh sebuah surat kabar. Koran SundayPost mengatakan, 55% masyarakat Skotlandia memilih Skotlandia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris. Sedangkan 45% menyatakan setuju Skotlandia berpisah dari kerajaan Inggris. Referendum itu sendiri akhirnya memutuskan Skotlandia tetap bergabung dengan Kerajaan Inggris.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Mengapa kelompok Pro-Kemerdekaan Skotlandia kalah dalam referendum 2014?

C. Landasan Teori

Kekalahan yang dihadapi oleh Partai Nasional Skotlandia dalam upaya kemerdekaan Skotlandia dari bagian Inggris raya ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa partai yang memiliki suara mayoritas di parlemen Skotlandia dapat kalah dalam referendum yang dilaksanakan pada 2014 lalu. Hal ini mendorong pemikiran apakah strategi yang digunakan Inggris dalam melakukan pendekatannya terhadap masyarakat Skotlandia, sehingga mayoritas dari mereka memilih untuk tetap bergabung dengan Inggris.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan diatas dengan menggunakan teori integrasi nasional oleh Myron Weiner (1971). Ia memberikan lima definisi, yaitu:⁵

⁴“Hasil referendum; Skotlandia pilih ‘tidak’ untuk kemerdekaan”, republika diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/09/19/nc4wb4-hasil-referendum-sotlandia-pilih-tidak-untuk-kemerdekaan> diakses pada 25 oktober 2016 pukul 14.30 WIB

⁵Ake, Claudio, 1987, *A Theory of Political Integration*, Illinois, The Dorsey Press

Pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.

Kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

Ketiga, integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.

Keempat, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.

Kelima, integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Sedangkan, keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap menggunakan beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu:

Pertama, Strategi Asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya.

Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Kedua, Strategi Akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya pembentuknya.

Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal.

Ketiga, Strategi Pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai.

Dalam melaksanakan strategi ini, Inggris memberikan tawaran otonomi lebih sebagai salahsatu pertimbangan mayoritas masyarakat Skotlandia lebih memilih tetap bergabung dengan Inggris. Tawaran ini juga diberikan sebagai usaha Inggris mempertahankan integrasinya dengan Skotlandia dengan tetap menghargai perbedaan dalam masyarakat. Ditambah tunjangan pendidikan dan kesehatan selama ini merupakan bagian dari Inggris yang pastinya akan dihapus setelah merdeka.

Begitu pula tunjangan riset medis dari pemerintah Inggris untuk menyembuhkan penyakit Multiple Sclerosis yang didukung oleh NHS (National Health Service) yakni lembaga kesehatan masyarakat Skotlandia yang dibentuk dan dibiayai oleh Inggris akan langsung terhenti. Padahal

Skotlandia tidak punya rencana bagus untuk memberikan pendanaan dibidang semacam ini. Singkatnya sisi fiskal Skotlandia diperkirakan belum siap.⁶

Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Strategi-strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut.⁷

Menurut analisa, yang dilakukan Inggris sebagai pemerintah pusat lebih cenderung menggunakan strategi pluralis dalam upaya integrasi nasionalnya. Dimana Inggris dan Skotlandia memiliki perbedaan dasar baik budaya maupun social yang sangat berbeda. Inggris pernah memberikan beberapa wewenang otonomi bagi Skotlandia.

Pada referendum 1997, dalam referendum tersebut Skotlandia berhasil mendirikan parlemen sendiri serta otoritas dalam mengatur pajaknya serta beberapa otonomi mandiri yang tidak dapat diganggu oleh parlemen Inggris. Hal tersebut membuktikan bahwa Inggris tidak secara langsung mengatur negaranya agar tunduk dengan satu peraturan yang sama dengan Inggris. Begitupula dengan keputusan Inggris yang akan memberikan devolusi lebih apabila Skotlandia tetap berada dalam wilayah integritas Inggris.

⁶ Highlands and Islands Medical Service (HIMS)
www.60yearsofhighscotland.co.uk. Diakses 29 Oktober 2016 13:00 WIB

⁷“Macam-macam pengaplikasian integrasi” Edukasi online, diakses dari
<http://www.edukasipkn.com/2016/05/macam-macam-strategi-untuk-mewujudkan.html> dibuka pada tanggal 29 oktober 2016 14.15 WIB

Lalu penjelasan mengenai pengertian devolusi dipaparkan melalui sebuah konsep. Menurut Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983), devolusi adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi kepada unit-unit pelaksana daerah dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Seperti saat sebelum referendum 2014, parlemen Skotlandia hanya mengurus hal-hal terkait pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi saat akan menjelang referendum, Inggris menawarkan pemberdayaan unit lokal yang lebih meluas kepada pemerintahan Skotlandia untuk mengurus masalah pajak dan bea cukai yang sebelumnya merupakan wewenang Inggris.

D. Hipotesa

Dari kerangka teori diatas dapat ditarik hipotesa mengenai: kelompok Pro-Kemerdekaan Skotlandia kalah dalam referendum 2014 disebabkan oleh: *Pertama*, pemerintah pusat berhasil menarik perhatian publik Skotlandia dengan menawarkan devolusi secara lebih luas. *Kedua*, sebagian besar warga Skotlandia masih percaya perlunya mempertahankan integrasi dengan Inggris karena Inggris dapat menjamin kebutuhan negara dan warga Skotlandia.

E. Tujuan Penulisan

- Meneliti kegagalan kelompok pro-kemerdekaan Skotlandia dalam referendum 2014.
- Mengaplikasikan ilmu dan teori selama kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Dimana merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Penulisannya lebih kepada Library Research atau studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder seperti buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

G. Jangkauan Penelitian

Agar mempermudah dalam penelitian serta penulisan, maka penulis menetapkan jangkauan penulisan skripsi yang berjudul “Kegagalan Kelompok Pro-Kemerdekaan dalam Referendum 2014 di Skotlandia”, penulis membatasi masalah yang diteliti yakni seputar Referendum 2014 dan kegagalan kelompok pro-kemerdekaan.

Hal tersebut dikarenakan, dinamisnya isu dan perkembangan isu hubungan internasional. Apabila ada pembahasan yang diluar jangkauan waktu yang telah ditentukan, selama masih ada kolerasi dan relevansi maka penulis menggunakannya sebagai bahan pelengkap penelitian sebagai tinjauan historis dan penjelasan karya ilmiah ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara garis besar dalam penulisan skripsi ini, yakni: pada bab 1 berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 berisikan penjelasan tentang sejarah bersatunya Skotlandia dengan Britania Raya dan kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Skotlandia. Dengan adanya sejarah singkat Skotlandia, keadaan ekonomi dan infrastruktur Skotlandia, hukum dan peradilan Skotlandia, pemerintah dalam yang mengatur beberapa kebijakan di Skotlandia, posisi Skotlandia di Britania Raya, kebijakan pemerintah Inggris terhadap Skotlandia, dan kepentingan pemerintah Inggris terhadap Skotlandia.

Untuk bab 3 dijelaskan tentang munculnya gerakan Pro-Kemerdekaan serta upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Berisikan awal munculnya

kelompok pro-kemerdekaan Skotlandia. Partai pendukung kemerdekaan, tokoh-tokoh dalam mendukung kemerdekaan, media pendukung, kampanye kemerdekaan dan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh kelompok yang kontra akan kemerdekaan, referendum 2014, serta poling perhitungan sementara hasil referendum 2014 hingga final.

Bab 4 membahas tentang alasan-alasan kegagalan kelompok Pro-Kemerdekaan dalam referendum 2014 lalu di Skotlandia. Adanya tawaran devolusi yang lebih luas, warga Skotlandia ragu akan kesiapan kemerdekaan Skotlandia, nasib mata uang yang belum pasti apabila merdeka, serta ketergantungan pendapatan Skotlandia pada minyak dan gas yang semakin menipis. Juga pada bab 5 yakni kesimpulan dari skripsi yang telah ditulis. Dan terakhir daftar pustaka.